

Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS-NG) Dalam Pengusulan Bantuan Sosial

Lailul Mursyidah^{1*}, Fadila Putri Arydianti²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Abstract

This research aims to find out, analyze, and describe the effectiveness of the application of the Social Welfare Information System - Next Generation (SIKS-NG) application in proposing social assistance. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through direct observation, interviews, and documentation. The informants in this study were determined by purposive sampling, namely the Keper Village SIKS-NG operator, Mr. Imam Sugiantoro as the Head of the Welfare Section. The results of the research adjusted to the theory of Richard M. Steers show that in the adaptation indicator there are still obstacles in the lack of training, system update problems, and technical constraints. In the goal achievement indicator, there is a mismatch between the data on beneficiaries proposed by the village and those that come down from the center. And the integration indicator shows that there is a lack of socialization related to this application so that community involvement in proposing beneficiaries is also lacking.

Keywords: effectiveness, siks-ng, social assistance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan efektivitas penerapan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) dalam pengusulan bantuan sosial. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling* yakni operator SIKS-NG Desa Keper, Bapak Imam Sugiantoro selaku Kepala Seksi Kesejahteraan. Hasil penelitian yang disesuaikan dengan teori Richard M. Steers menunjukkan bahwa pada indikator adaptasi masih terdapat kendala pada kurangnya pelatihan, masalah pembaruan sistem, dan kendala teknis. Pada indikator pencapaian tujuan terdapat ketidaksesuaian data penerima bantuan yang diusulkan pihak desa dengan yang turun dari pusat. Dan pada indikator integrasi menunjukkan bahwa kurang adanya sosialisasi terkait aplikasi ini sehingga keterlibatan masyarakat dalam pengusulan penerima bantuan juga kurang.

Kata kunci: bantuan sosial, efektivitas, siks-ng

* lailulmursyidah@umsida.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi, terutama teknologi komputer kini telah terbukti dapat merubah mekanisme kerja yang panjang dan berulang menjadi lebih efektif (Haromin, 2022). Di tingkat dunia, negara maju telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik untuk meningkatkan pelayanan informasi antar pemerintahan (G2G), antar masyarakat (G2C), dan antar dunia usaha (G2B) (Marino, 2018).

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dikenal dengan istilah *e-government* (Choirunnisa et al., 2023). *E-government* dalam pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dengan meminimalisir aktifitas yang tidak efisien serta mendukung pelaksanaan *good governance* (Djabbari et al., 2024). Dalam penerapan *e-government* dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk merencanakan hal baru dalam pemerintahan (Akbar et al., 2023).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, pemerintah pusat dan daerah diminta untuk merumuskan

strategi dan kebijakan pengembangan *e-government* di masing-masing instansi. Saat ini *e-government* pada tiap bidang atau instansi sangat beragam, salah satunya pada bidang kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia yang jika dilihat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,42 juta orang atau sekitar 9,54% dari total populasi (BPS, 2023). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Peran data dalam program penanggulangan kemiskinan sangat krusial, karena berkaitan dengan penetapan sasaran penerima program bantuan sosial untuk menjamin keefektifan program bantuan sosial tersebut. Bantuan sosial merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Dalam hal kesejahteraan masyarakat, fokus

pemerintah berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Masalah kemiskinan dan ketidakmerataan menjadi pusat perhatian dari sebuah kebijakan kesejahteraan (Lasari & Ali, 2024).

Untuk menanggulangi adanya peningkatan angka kemiskinan yang terjadi, maka pemerintah berinovasi menciptakan sebuah *e-government* pada bidang kesejahteraan sosial yang dapat digunakan untuk pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG). SIKS-NG merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2017 untuk mengelola data dan informasi terkait dengan program pemberdayaan sosial. Aplikasi ini mendukung konsep *good governance* karena dapat meningkatkan akurasi data, mempercepat proses verifikasi dan validasi sehingga dapat mengurangi ketidaksesuaian data dalam distribusi bantuan. Aplikasi ini menjadi wadah yang dapat digunakan untuk pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data yang terkini dan akurat tentang

Kesejahteraan sosial masyarakat yang digunakan sebagai acuan dalam pengusulan bantuan sosial dari pemerintah untuk masyarakat yang membutuhkan.

Tujuan dari pengelolaan DTKS ialah untuk memperoleh data masyarakat yang valid dan aktual sesuai dengan dilapangan (Ulum & Purwatiningsih, 2023). Kurangnya data dan informasi yang akurat dapat membuat perumusan dan implementasi kebijakan menjadi kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, dalam proses pengusulannya juga dilakukan proses verifikasi dan validasi data untuk pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data tersebut dengan beberapa tahapan yaitu: penyusunan daftar awal sasaran, bimbingan teknis, musyawarah desa/kelurahan, kunjungan kerumah tangga miskin, pengelolaan data, pengawasan, pemeriksaan dan pelaporan (Andriani et al., 2023). Verifikasi dan validasi data ini dilakukan untuk menilai kelayakan penerima bantuan agar tepat sasaran, sehingga tujuan dari adanya aplikasi ini dapat tercapai secara efektif.

Keberhasilan penerapan aplikasi SIKS-NG dapat diukur melalui sejauh mana aplikasi ini dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketepatan waktu, efisiensi,

dan kualitas pelayanan. Dengan demikian, aplikasi yang efektif dapat meninggalkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik, serta meningkatkan kepuasan masyarakat. Menurut Richard M. Steers, ukuran dari tingkat efektivitas dalam penerapan kebijakan yaitu, sebagai berikut: (1) Adaptasi, yaitu proses penyesuaian diri yang dilakukan oleh individu terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. (2) Pencapaian Tujuan, yaitu usaha yang dipandang sebagai suatu proses. (3) Integrasi, yaitu tolak ukur suatu organisasi dalam melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan organisasi lain.

Salah satu permasalahan utama dalam efektivitas penerapan suatu kebijakan adalah implementasi yang buruk. Meskipun suatu kebijakan telah dirancang dengan baik, namun jika implementasinya buruk, maka kebijakan tersebut tidak akan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ada berbagai hambatan yang terjadi dalam pengembangan *e-government* yang umum terjadi termasuk infrastruktur TIK yang buruk, sumber daya manusia yang tidak memadai, kurangnya kesiapan warga negara untuk menggunakan layanan *e-government*, dan lingkungan yang tidak mendukung (Sabani, 2019).

Pelaksanaan *e-government* tidak hanya dilakukan di lembaga-lembaga

pusat saja tetapi dapat dilaksanakan di tingkat pemerintahan desa (Agus Diana et al., 2024). Seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah dikerjakan secara sistematis melalui aplikasi SIKS-NG di seluruh Indonesia dan yang memiliki peran penting dalam pengelolaannya adalah desa (Windari & Rodiyah, 2023). Di Kabupaten Sidoarjo, seluruh pemerintah desa sudah mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui aplikasi SIKS-NG. Desa Keper, yang terletak di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, merupakan salah satu desa yang telah menerapkan SIKS-NG dalam proses pengurusan bantuan sosial.

Pemerintah Desa Keper mulai mengoperasikan aplikasi SIKS-NG sejak tahun 2018. Dengan adanya aplikasi ini, pihak pemerintah Desa Keper dapat dengan mudah mengajukan usulan untuk masyarakat yang tidak mampu sesuai kondisi kebutuhan mereka. Aplikasi SIKS-NG tingkat kelurahan digunakan oleh operator khusus, sehingga masyarakat yang akan mengajukan usulan atau akan memeriksa data secara berkala dapat mengunjungi kelurahan dengan membawa dokumen pendukung seperti Kartu Keluarga (Ergi et al., 2024). Adapun bantuan yang tercantum dalam aplikasi SIKS-NG yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI),

Sembako, Program Keluarga Harapan, dan sebagainya.

Akan tetapi, berdasarkan observasi awal peneliti, walaupun sudah menggunakan aplikasi SIKS-NG dalam proses pengusulan bantuannya, masih terdapat permasalahan seperti adanya ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial pada sistem DTKS yang ada di aplikasi SIKS-NG dengan data penerima bantuan sosial yang terbit dari pusat ke desa. . Selain itu, jika dilihat dari rekap DTKS, masyarakat miskin Desa Keper yang terdaftar dalam DTKS aplikasi SIKS-NG sebanyak 701 keluarga dari jumlah penduduk desa total sebanyak 1.082 penduduk. Namun, dari total penduduk miskin tersebut tidak semua mendapatkan bantuan sosial dari aplikasi SIKS-NG. Hal ini terjadi karena data yang diusulkan oleh pihak desa, dalam proses verifikasi dan validasinya ditolak atau dihapuskan dari DTKS oleh pusat dengan alasan data warga tersebut dianggap sudah mampu oleh kabupaten dan sudah tidak memenuhi kriteria penerima bantuan, padahal kenyataan yang ada dilapangan warga tersebut sangat membutuhkan bantuan. Hal sebaliknya yang terjadi, justru terkadang warga yang tidak terdaftar dalam DTKS terdaftar dalam program bantuan sosial tersebut

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi beberapa isu yang relevan hingga saat ini mengenai efektivitas penerapan aplikasi SIKS-NG dalam pengusulan bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Penelitian yang dilakukan Purwanti (2023) menunjukkan simpulan bahwa implementasi aplikasi SIKS-NG dalam pemutakhiran DTKS menghasilkan data yang sesuai dengan kondisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di lapangan. Namun, sering terjadi ketidaksesuaian NIK KPM antara data pada aplikasi SIKS-NG dengan yang ada dilapangan, sehingga menyebabkan data yang diusulkan tidak valid. Permasalahan serupa juga ditemukan dalam penelitian menurut Asrandi (2022) yang menunjukkan simpulan bahwa Pengelolaan DTKS di Dinas Sosial Kabupaten Sampang belum optimal karena masih ditemukan ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat serta data yang belum diperbarui.

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas dan kajian penelitian terdahulu tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan efektivitas penerapan aplikasi SIKS-NG dalam pengusulan bantuan sosial di Desa Keper

Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.

METODE

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Penelitian ini berfokus pada efektivitas penerapan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – *Next Generation* (SIKS-NG) dalam pengusulan bantuan sosial, yang akan diukur berdasarkan indikator efektivitas menurut Richard M. Steers, antara lain: (1) Adaptasi, (2) Pencapaian Tujuan, (3) Integrasi. Peneliti akan mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini didapat melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari penerapan aplikasi SIKS-NG dalam pengusulan bantuan sosial. Dan

kemudian melakukan wawancara langsung dengan informan yang telah ditentukan dengan *purposive sampling* yakni operator SIKS-NG Desa Keper, Bapak Imam Sugiantoro selaku Kepala Seksi Kesejahteraan. Serta didukung data sekunder berupa data jumlah warga miskin dan data jumlah usulan hingga penerima bantuan sosial pada aplikasi SIKS-NG Desa Keper. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Lokasi ini dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain karena Desa Keper merupakan salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo yang sudah menerapkan aplikasi SIKS-NG dalam pengusulan bantuan sosial. Selain itu, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas penerapan aplikasi SIKS-NG itu sendiri yang belum sesuai dengan tujuan adanya aplikasi ini yaitu untuk membantu proses penyaluran bantuan social agar tepat sasaran.

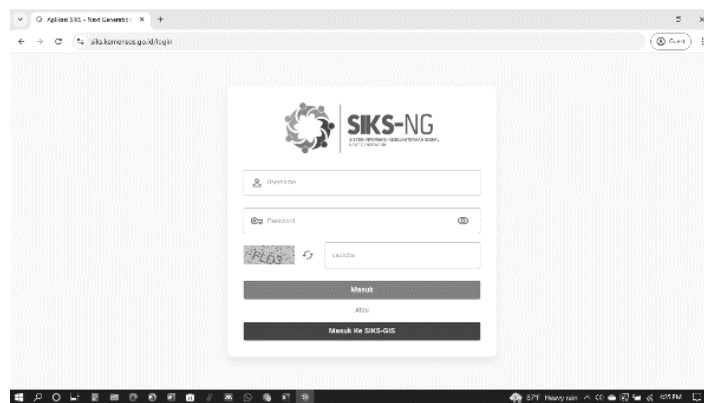
HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi dan dalam kaitannya dengan good governance, maka pemerintah dapat memanfaatkan

kemajuan yang ada untuk mempermudah upaya penanggulangan kemiskinan melalui e-government agar lebih efektif. Di Indonesia, pemanfaatan *e-government* telah diimplementasikan secara bertahap dalam berbagai fungsi pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga ke pemerintahan yang paling kecil yaitu desa (Kane et al., 2016). Efektivitas

penerapan *e-government* berfokus pada sejauh mana aplikasi dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan mempertimbangkan ketepatan waktu, efisiensi, dan kualitas pelayanan.

Aplikasi SIKS-NG merupakan salah satu wujud dari pemanfaatan *e-government* pada bidang kesejahteraan sosial di Indonesia.



Gambar 1.
Tampilan Awal Aplikasi SIKS-NG

Sumber: Aplikasi SIKS-NG, 2024

Aplikasi ini digunakan oleh operator desa untuk mengusulkan bantuan sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Aplikasi pengolah data kesejahteraan sosial merupakan program dalam proses perbaikan dan pengusulan data basis terpadu yang didalamnya terdapat modul untuk perbaikan dan pengusulan data bantuan sosial kepada masyarakat sehingga terverifikasi dan tervalidasi sehingga dapat menurunkan data kemiskinan (Andriani et al., 2023). Namun, dalam penerapannya masih

ditemukan beberapa permasalahan, seperti di Desa Keper yang berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas penerapan aplikasi SIKS-NG tersebut.

Dalam menganalisis dan mendeskripsikan berbagai permasalahan terkait efektivitas penerapan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – *Next Generation* (SIKS-NG) tersebut peneliti menggunakan tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur

tingkat ukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Richard M. Steers yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, dan integrasi.

Adaptasi

Indikator adaptasi digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan efektivitas penerapan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – *Next Generation* (SIKS-NG) dalam pengurusan bantuan sosial. Dalam indikator adaptasi, suatu organisasi dapat dikatakan efektif jika mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan menjaga keberlangsungan operasional dalam menanggapi perubahan tersebut. Indikator ini menilai sejauh mana suatu organisasi dapat merespons perubahan eksternal dan internal untuk mempertahankan efektivitasnya. Penerapan suatu kebijakan dapat dikatakan efektif apabila pelaksana kebijakan paham dengan apa yang harus dilakukan untuk mendukung pelayanan publik yang baik dan terintegrasi (Ariyaningsih et al., 2023). Dalam hal ini, aplikasi SIKS-NG dapat dikatakan efektif apabila sumber daya atau operator aplikasi SIKS-NG di Desa Keper paham dan dapat menjalankan aplikasi ini sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, sarana dan

prasarana seperti perangkat lunak dan jaringan internet juga menjadi tolak ukur efektivitas penerapan aplikasi ini di Desa Keper.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang disesuaikan dengan teori M. Richard Steers, pada indikator adaptasi, diketahui bahwa penerapan aplikasi SIKS-NG dalam pengurusan bantuan sosial di Desa Keper terhadap aplikasi SIKS-NG ini tergolong kurang efektif. Dari segi sumber daya manusia atau operator, operator telah memahami secara umum fungsi dari aplikasi SIKS-NG ini yakni sebagai wadah pengurusan bantuan sosial.

Namun, terdapat kendala yang menghambat efektivitas penggunaan aplikasi SIKS-NG ini di Desa Keper. Kurangnya pelatihan untuk operator dan pembaruan sistem yang otomatis tanpa ada pemberitahuan menjadi kendala utama. Dengan kondisi kurangnya pelatihan ini membuat operator desa menjadi kurang siap dalam beradaptasi dengan perubahan sistem yang ada. Hal ini menjadi alasan penghambat kemampuan operator dalam mengoptimalkan penggunaan aplikasi untuk pengurusan bantuan.

Selain itu, masalah teknis seperti jam operasional aplikasi yang terbatas dan lambatnya proses persetujuan usulan juga turut mempengaruhi efisiensi dan

efektivitas kerja operator SIKS-NG di Desa Keper. Kendala-kendala tersebut berdampak pada proses pengusulan bantuan sosial yang menjadi kurang efisien, seperti saat ada usulan bantuan yang diajukan oleh operator SIKS-NG di Desa Keper yang tidak segera diproses sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan akhirnya penyaluran bantuan mengalami keterlambatan. Hal ini tentu berdampak juga pada proses pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Dari segi sarana dan prasarana, dukungan sarana dan prasarana untuk penerapan aplikasi SIKS-NG dalam pengusulan bantuan di Desa Keper seperti laptop dan jaringan internet dari pemerintah desa telah membantu memperlancar operasional SIKS-NG di Desa Keper. Namun, penggunaan kuota pribadi untuk mengakses sistem di luar jam kerja menjadi tanggungjawab tambahan bagi operator.

Pencapaian Tujuan

Pada indikator ini, kesesuaian hasil penerapan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dijadikan tolak ukur yaitu dengan melihat sasaran atau target yang kongkrit. Faktor tersebut akan dijadikan tolak ukur untuk mengetahui efektivitas penerapan

aplikasi SIKS-NG di Desa Keper. Dalam penerapan aplikasi ini, peran data sangat krusial karena berkaitan dengan penetapan sasaran penerima program bantuan sosial agar pendistribusiannya dapat sesuai dengan sasaran. Bantuan sosial merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang disesuaikan dengan teori Richard M. Steers, pada indikator pencapaian tujuan, terlihat bahwa penerapan aplikasi SIKS-NG dalam pengusulan bantuan di Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan awal penerapan SIKS-NG yang memastikan bantuan sosial dapat tepat sasaran dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Meskipun SIKS-NG ini diatur untuk mengidentifikasi penerima bantuan yang paling rentan, namun kondisi di lapangan masih ditemukan ketidaksesuaian. Beberapa data warga penerima yang seharusnya mendapat bantuan tidak terdata atau ada juga yang dihapus dari DTKS oleh pusat, sementara itu ada penerima yang tidak termasuk dalam kriteria penerima bantuan namun tetap mendapatkan bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa

mekanisme penentuan target dalam mensejahterakan masyarakatnya yang SIKS-NG belum sepenuhnya efektif paling rentan atau paling membutuhkan. dalam mencapai tujuannya untuk

Tabel 1.
Data Usulan Penerima Bantuan Sosial Desa Keper

Jenis Bantuan Sosial	Jumlah Alokasi SIKS-NG	Jumlah Realisasi
PBI	194 KPM	151 KPM
Sembako	312 KPM	314 KPM
PKH	156 KPM	129 KPM

Sumber: Hasil olah Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa data usulan penerima bansos di Desa Keper ditemui selisih antara jumlah usulan alokasi pada aplikasi SIKS-NG dengan jumlah alokasi realisasinya. Berdasarkan DTKS di SIKS-NG Desa Keper, selisih ini disebabkan oleh adanya data yang dikeluarkan karena beberapa alasan, seperti warga tersebut sudah dianggap mampu dan NIK yang terdaftar tidak berdomisili di Desa Keper. Adanya ketidakakuratan data ini dapat menghambat proses evaluasi suatu kebijakan. Hal inilah yang membuat timbulnya selisih paham antara masyarakat dengan pihak pemerintah desa, terutama dengan operator SIKS-NG selaku kasi kesejahteraan masyarakat.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya permasalahan tersebut adalah karena proses finalisasi data yang

dilakukan oleh pusat tidak selalu sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, adanya perbedaan identifikasi kriteria penerima bantuan antara pusat dan daerah juga dapat menjadi kendala, yang mengakibatkan banyak warga yang seharusnya mendapatkan bantuan justru dihapuskan di DTKS dan perlu diusulkan ulang, sementara warga yang tidak memenuhi syarat tetap mendapatkan bantuan. Kondisi ini tentunya akan menimbulkan pertanyaan terkait keadilan dan efektivitas penyaluran bantuan sosial melalui SIKS-NG di Desa Keper.

Integrasi

Pada indikator ini, efektivitas penerapan aplikasi SIKS-NG di Desa Keper dapat dikatakan efektif apabila penerapan dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Selain itu, kemampuan sosialisasi terkait

aplikasi SIKS-NG yang diberikan kepada warga juga menjadi tolak ukur efektivitas penerapan aplikasi SIKS-NG di Desa Keper.

Berdasarkan hasil penelitian yang disesuaikan dengan teori Richard M. Steers, pada indikator integrasi, dapat dilihat bahwa penerapan aplikasi SIKS-NG dalam pengusulan bantuan sosial di Desa Keper pada proses pengusulan bantuan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pelaksanaan prosedur. Prosedur yang ada seharusnya melaksanakan musyawarah desa sebagai forum untuk menjelaskan mekanisme, persyaratan pengusulan, dan penentuan siapa warga yang termasuk dalam kriteria penerima bantuan. Namun, kondisi yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pengusulan bantuan di Desa Keper tidak melalui prosedur musyawarah desa, melainkan melalui koordinasi dengan Ketua RT untuk selanjutnya data warga yang dianggap tidak mampu tersebut baru diserahkan atau diusulkan ke desa.

Dari segi sosialisasi juga kurang optimal, karena sejak pertengahan tahun 2023 hingga saat ini, tidak diadakan lagi kegiatan sosialisasi terkait SIKS-NG. Hal ini disebabkan karena sebelumnya pernah diadakan sosialisasi, namun antusiasme warga terlalu tinggi sehingga semua warga ingin datanya dimasukkan

dalam sistem DTKS di SIKS-NG untuk mendapat bantuan, padahal belum tentu data warga tersebut tidak terdaftar di DTKS yang ada di aplikasi SIKS-NG, ada juga yang sudah terdaftar. Selain itu, hal ini juga menyebabkan warga yang tidak memenuhi kriteria atau warga yang dianggap mampu tetap mengajukan permohonan bantuan atau pengajuan data untuk dimasukkan dalam DTKS.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – *Next Generation* (SIKS-NG) di Desa Keper telah memberi manfaat untuk memudahkan pemerintah desa mengusulkan bantuan, akan tetapi dalam penerapannya juga masih ada beberapa kendala yang terjadi dan perlu ditingkatkan. Kendala tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator. Dari indikator adaptasi, dapat dilihat bahwa efektivitas penerapan aplikasi SIKS-NG dalam pengusulan bantuan sosial di Desa Keper belum efektif. Meskipun operator telah memahami fungsi dasar aplikasi SIKS-NG dan penerapan aplikasi ini telah didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, namun masih ada kendala seperti kurangnya bimtek atau bimbingan teknologi, masalah

pembaruan sistem, hingga masalah teknis yang menghambat efisiensi pengusulan bantuan melalui SIKS-NG.

Dari indikator pencapaian tujuan, dapat dilihat bahwa efektivitas penerapan aplikasi SIKS-NG dalam pengusulan bantuan sosial di Desa Keper juga belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesenjangan atau gap antara tujuan awal dari aplikasi ini dengan kondisi di lapangan. Adanya ketidaksesuaian data dan perbedaan persepsi pada kriteria penerima bantuan antara pusat dengan yang ada di desa menghambat efektivitas penerapan aplikasi ini dalam mencapai tujuannya karena mengakibatkan ketidaksesuaian dalam penentuan target penerima bantuan sosial.

Dari indikator integrasi, dapat dilihat bahwa efektivitas penerapan aplikasi SIKS-NG dalam pengusulan bantuan sosial di Desa Keper belum efektif. Hal ini dilihat dari prosedur pada proses pengusulan bantuan yang hanya mengandalkan koordinasi dari ketua RT tanpa melalui musyawarah desa. Selain itu, sosialisasi tentang SIKS-NG juga kurang efektif, karena hanya dilakukan sekali dan tidak dilakukan lagi akibat antusiasme warga yang tinggi.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis terhadap tiga indikator efektifitas menurut Richard

M. Steers diatas, untuk mengatasi permasalahan yang ada, perlu dilakukan beberapa hal untuk memperbaiki penyebab permasalahan seperti perlu adanya peningkatan konsistensi dalam bimbingan teknis bagi operator SIKS-NG untuk memastikan pemahaman terhadap fitur-fitur dan pembaruan sistem yang ada, untuk mengurangi ketidaksesuaian data target penerima perlu adanya peningkatan mekanisme sinkronisasi data antara pusat dengan desa. Dan yang terakhir, perlu dipertimbangkan terkait pentingnya pelaksanaan musyawarah desa dan sosialisasi dalam pengusulan bantuan sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, diharapkan penerapan aplikasi SIKS-NG dalam pengusulan bantuan sosial di Desa Keper dapat lebih efektif sehingga penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada para stakeholder yang berperan dalam program bantuan yang ada pada aplikasi SIKS-NG untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan guna meningkatkan efektivitas penerapan aplikasi SIKS-NG sehingga dapat mencapai tujuan dari adanya aplikasi ini

yaitu untuk memberikan bantuan secara merata dan tepat sasaran bagi masyarakatnya yang kurang mampu. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang meneliti topik serupa dan dapat menjadi pengembangan penelitian di daerah lain yang menggunakan aplikasi ini dengan masalah serupa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih pada semua keluarga /semua orang terdekat yang telah memberi support penulis dalam menyelesaikan artikel ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat desa, terutama Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Keber yang telah berkenan menjadi informan pada penelitian ini serta banyak memberi semangat penulis dalam melakukan penelitian ini.

REFERENSI

- Agus Diana, B., Sunarya, A., & Harta, R. (2024). Kajian Pelaksanaan E-Government pada Pemerintahan Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(1), pp. 181–194. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i1.3032>
- Akbar, M. F., Malipi, S., & Sahi, N. A. (2023). Implementasi Program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) di Desa Huntu Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo. *International Jurnal Papier*, 4(2), pp. 29–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.47667/ijppr.v4i2.214>
- Andriani, Y., Suwitri, S., & Yuniningsih, T. (2023). Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 11(2), pp. 129–147. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v11i2.11255>
- Ariyaningsih, B., Subagyov, A., Suhartono, B., Hadi Rivai, F., & Rajab, R. (2023). Implementation of E-Governance to Encourage Integrated Public Services in Lebak Regency. *KnE Social Sciences*, 2023, pp. 159–180. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i11.13545>
- Asrandi T, A. M., Wati, S. A., Wahab, A., & Alfian, A. (2022). Efektivitas Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) dalam Mendukung Program SLRT dan Puskesmas Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(09), pp. 1294–1305. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i09.695>
- BPS. (2023). *Persentase Penduduk Miskin (P0)*. Sidoarjo: Bps.Go.Id. <https://sidoarjo.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTI4IzI=/persentase-penduduk-miskin-p0-.html>

- Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 3(1), pp. 71–95. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.401>
- Djabbari, M. H., B. I., Nugroho, T. C., Amiruddin, I., & Yanto, E. (2024). E-Government dalam Pelayanan Publik Berbasis Website di Desa Tondowolio Kabupaten Kolaka. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 10, pp. 1–10.
- Ergi, R., Intan, N., Ismi, R. S., Sunandie, E. G., & Rahmat, S. (2024). Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) untuk Pengajuan DTKS. *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, 4(2), pp. 109–115.
- Haromin, D. A. (2022). Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. *Jurnal Jisipol*, 6 Nomor 3(November), pp. 34–56. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/958/796>
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- Kane, S. N., Mishra, A., & Dutta, A. K. (2016). Challenges in developing e-government for good governance in North Sumatra. *Journal of Physics: Conference Series*, 755(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/755/1/011001>
- Lasari, D., & Ali, H. (2024). Strategi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Agam. *Jurnal Mirai Management*, 9(1), pp. 2024–2036.
- Mariano, S. (2019). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699.
- Peraturan Kementerian Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- Purwanti, E. H. (2023). Penerapan E-Government Pada Aplikasi SIKS-NG di Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 4(1), pp. 91–103. <https://doi.org/10.33822/jpds.v4i1.6580>
- Sabani, A. (2019). Evaluating the Development of E-Government in Indonesia. *Association for Computing Machinery*, pp. 254–258. <https://doi.org/10.1145/3305160.3305191>
- Ulum, T., & Purwatiningsih, A. (2023). Efektivitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berbasis Aplikasi SIKS-NG di Dinas Sosial Kabupaten Sampang. *Jurnal Ilmiah Publik*, 11(1), pp. 184–187.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Windari, V. D., & Rodiyah, I. (2023). Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) (Studi di Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo). *Respository Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, pp. 1–11.